

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia sangat berfluktuasi dari waktu ke waktu. Di mana Indonesia mempunyai 34 provinsi dengan tingkat keragaman pertumbuhan ekonomi yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan setiap provinsi memiliki perbedaan potensi baik dari sumber daya alam maupun sumber daya manusia dan kualitas teknologi yang dimiliki oleh provinsi tersebut. Indonesia adalah negara yang mempunyai banyak kepulauan, salah satunya adalah Pulau Sumatera.

Pulau Sumatera terdiri dari beberapa provinsi yaitu : Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung dan ditambah 2 Provinsi Pemekaran yaitu Kepulauan Riau dan Kepulauan Bangka Belitung. Masing-masing pulau memiliki potensi sumber daya alam dan sektor-sektor unggulan yang menjadi daya tarik tersendiri bagi provinsi tersebut. Perbedaan inilah yang menimbulkan perbedaan tingkat pertumbuhan pembangunan daerah di masing-masing provinsi yang ada di Indonesia. Ketimpangan antarwilayah dipengaruhi oleh tingkat pendapatan dan jumlah penduduk yang pada akhirnya menghasilkan pendapatan per kapita dan dijadikan sebagai salah satu indikator tingkat kesejahteraan.

Tabel 1
PDRB Atas Harga Berlaku 2015-2018 Pulau Sumatera (Miliar Rupiah)

Provinsi	2015	2016	2017	2018
Aceh	129.093	136.844	145.807	155.912
Sumut	571.722	626.063	648.275	741.193
Sumbar	179.952	196.099	231.890	230.529
Riau	652.762	681.699	704.798	755.274
Jambi	155.066	171.199	189.868	208.379
Sumsel	331.766	353.867	382.886	419.723
Bengkulu	50.334	55.384	60.658	66.413
Lampung	252.883	279.418	306.700	333.681
Babel	60.987	65.048	69.861	73.069
Kepri	199.570	216.008	227.763	249.077
Sumatera	2.584.134	2.781.629	2.986.505	3.233.250

Sumber; www.bps.go.id2018

Data PDRB adalah salah satu indikator ekonomi makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian daerah setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari PDRB atas harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah setiap tahun. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya. Hal ini juga akan memengaruhi proses pembangunan di suatu wilayah, dimana daerah dengan kondisi ekonomi yang baik akan cepat dalam pembangunan wilayah tersebut dan daerah dengan kondisi ekonomi yang lemah akan lambat dalam proses pembangunan. Dilihat dari data di atas PDRB tertinggi untuk tahun 2018 berada di Provinsi Riau dengan jumlah 755.274 miliar dan yang terendah berada di Provinsi Bengkulu dengan jumlah 66.413 miliar.

Menurut teori Neo Klasik, terdapat faktor-faktor yang memengaruhi ketimpangan antarwilayah yaitu perbedaan sumber daya alam, faktor demografis termasuk kondisi tenaga kerja, alokasi dana pembangunan antarwilayah baik investasi pemerintah maupun investasi swasta, konsentrasi kegiatan ekonomi

wilayah, dan mobilitas barang dan jasa. Adanya perbedaan ini menyebabkan kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda.

Pembangunan merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan bangsa, dan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan dari suatu negara. Pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum tujuan bangsa Indonesia diantaranya yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam pelaksanaan pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah sasaran utama bagi negara-negara sedang berkembang. Hal ini disebabkan pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan peningkatan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat, sehingga dengan semakin banyak barang dan jasa yang diproduksi, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat (Mirza, 2012).

Proses pembangunan paling tidak memiliki tiga tujuan inti yaitu peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kebutuhan hidup yang pokok, peningkatan standar hidup, dan perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial. Selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan adalah menghapus dan mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan tingkat pengangguran. Pembangunan daerah sebenarnya adalah bagian integral dari pembangunan nasional. Pembangunan yang dilaksanakan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan harus seimbang jangan

sampai ada gerakan protes dari tiap daerah dan memunculkan potensi disintegrasi bangsa dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Todaro, 2006).

Isu dan kekhawatiran akan adanya gerakan disintegrasi tersebut akhirnya memunculkan undang-undang yang memberikan keleluasan kepada daerah dalam wujud otonomi daerah yang luas dan bertanggungjawab yang sesuai kondisi dan potensi wilayahnya. Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia sudah dilakukan sejak tanggal 1 Januari 2001. Melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menggali pendapatan dan melakukan peran alokasi secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan. Diharapkan dengan adanya otonomi dan desentralisasi fiskal dapat lebih pemeratakan pembangunan sesuai dengan keinginan daerah untuk mengembangkan wilayah menurut potensi masing-masing (Sasana, 2016).

Pemerintah melalui Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengatakan bahwa, perencanaan pembangunan nasional maupun regional merupakan kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan mengikuti pola tertentu berdasarkan hasil telaah yang cermat terhadap situasi dan kondisi yang bagus. Pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk merencanakan dan mengelola pembangunan melalui Undang-undang No. 22 tahun 1999 revisi menjadi Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No. 25 tahun 1999 revisi menjadi undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Kuncoro, 2004).

Suparmoko (2015) mengungkapkan, pembangunan ekonomi merupakan usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang sering kali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil per kapita, untuk menaikkan pendapatan per kapita nasional riil juga untuk meningkatkan produktifitas. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa tingkat *output* pada periode tertentu ditentukan oleh tersedianya atau digunakan Sumber Daya Alam (SDA) maupun Sumber Daya Manusia (SDM), tingkat teknologi, keadaan pasar dan kerangka kehidupan ekonomi (sistem perekonomian) serta sikap dari *output* itu sendiri. Dengan adanya pembangunan ekonomi maka *output* atau kekayaan suatu masyarakat atau perekonomian akan bertambah, hal tersebut akan menambah kebahagiaan masyarakat. Tujuan negara Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya. Secara teoritis, masalah kemiskinan, pengangguran atau kesempatan kerja akan dapat diatasi dengan memaksimalkan investasi yang produktif di berbagai sektor ekonomi.

Perbedaan kondisi demografis di suatu wilayah juga dapat menyebabkan ketimpangan pembangunan. Lokasi yang memiliki kondisi demografis yang baik seperti yang berada di dataran rendah akan mendapatkan suplai bantuan yang lebih cepat dan memadai di bandingkan dengan daerah yang berada di wilayah yang memiliki ketinggian yang lebih seperti daerah yang berada di perbukitan akan kurang mendapatkan suplai bantuan pembangunan karena akan terkendala dengan lokasi yang jauh dan medan yang sulit untuk dijangkau. Kondisi demografis juga akan memengaruhi kelancaran mobilitas barang dan jasa sehingga dapat menghambat proses pembangunan suatu wilayah. Kurang

lancarnya mobilitas barang dan jasa dapat mengurangi kinerja dari proses pembangunan wilayah sehingga membuat suatu wilayah mengalami sedikit ketertinggalan pembangunan dibandingkan wilayah yang mobilitas barang dan jasanya lancar.

Rasio dana perimbangan juga mempunyai pengaruh yang besar terhadap disparitas pembangunan di suatu wilayah. Jika dana perimbangan tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah yang terkait akan menyebabkan pembangunan yang tidak lancar. Hal ini akan menyebabkan wilayah tersebut menjadi wilayah yang tertinggal dibandingkan dengan wilayah lain yang dapat mengelola dana perimbangan dengan baik sehingga akan menjadikan wilayah tersebut akan cenderung lebih maju dalam proses pembangunan wilayah.

Jika dana perimbangan dikelola dengan tepat maka indeks pembangunan manusia di suatu wilayah akan meningkat serta dapat menjadi salah satu indikator dari pembangunan manusia di wilayah tertentu sehingga dengan indeks pembangunan manusia yang baik akan membuat perkembangan pembangunan suatu wilayah menjadi lebih pesat karena kualitas sumber daya manusia yang sudah memadai. Hal ini akan berbanding terbalik dengan wilayah yang masih tertinggal dalam indeks pembangunan manusia. Hal ini akan cenderung membuat perkembangan pembangunan suatu wilayah akan terhambat karena kurangnya SDM yang baik sehingga cenderung akan memperlambat pembangunan wilayah tersebut.

Tabel 2
Perbandingan Jumlah Penduduk Pria dan Wanita

Provinsi	2015		2016		2017		2018	
	P	W	P	W	P	W	P	W
Aceh	49.91	50.09	49.92	50.08	49.90	50.10	49.93	50.07
Sumut	49.88	50.12	49.00	50.10	49.91	50.09	49.93	50.10
Sumbar	49.71	50.29	49.77	50.23	49.74	50.26	49.77	50.23
Riau	51.33	48.67	51.33	48.67	51.31	48.69	51.30	48.70
Jambi	51.03	48.97	51.01	48.99	51.01	48.99	51.02	48.98
Sumsel	50.82	49.18	50.83	49.17	50.84	49.16	50.82	49.18
Bengkulu	50.98	49.02	51.00	49.00	50.99	49.01	50.97	49.03
Lampung	51.31	48.69	51.93	48.07	51.92	48.74	51.22	48.78
Bangka Belitung	51.91	48.09	51.93	48.07	51.92	48.08	51.97	48.03
Kep Riau	51.14	48.86	51.05	48.95	51.04	48.96	50.94	49.06

Sumber: BPS 2018

Gender merujuk pada hubungan antar laki laki dan perempuan dan bagaimana hubungan sosial ini dikonstruksikan. Hasil pembangunan manusia tidak memberikan manfaat yang adil antara laki laki dan perempuan belum cukup efektif dalam peningkatan pencapaian pembangunan perempuan dalam bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Di Pulau Sumatera, tidak terjadi perbandingan yang terlalu signifikan antara banyak jumlah penduduk laki laki dan perempuan yang dapat dilihat pada tabel di atas yang mana tidak terjadi perbedaan yang terlalu jauh, seperti perbedaan yang ada di Provinsi Aceh tahun 2018 yaitu jumlah penduduk laki laki sebesar 49.93% dan penduduk perempuan sebesar 50.03%.

Tabel 3**Panjang Jalan Negara Menurut Provinsi di Pulau Sumatera (Kondisi Baik/ KM)**

Provinsi	2015	2016	2017	2018
Aceh	1534	1522	982	1997
Sumatera utara	1451	529	942	2392
Sumatera barat	668	755	924	1355
Riau	543	710	1069	1165
Jambi	672	960	942	1248
Sumatera Selatan	466	498	856	1404
Bengkulu	552	572	624	710
Lampung	813	783	866	1175
Bangka Belitung	580	531	510	596
Kepulauan riau	452	354	334	549

Sumber: BPS 2018

Kondisi jalan yang baik dan pembangunan infrastuktur jalan yang baik dapat menunjang proses mobilitas masyarakat di suatu wilayah. Jalan yang baik dapat membantu mempermudah mobilitas masyarakat dalam menjalankan setiap aktifitasnya sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut, akan berbeda dengan wilayah yang kondisi jalanya tidak baik yang akan sangat menghambat mobilitas masyarakat di wilayah tersebut. Hal ini menyebabkan banyak kondisi jalan yang tidak merata seperti ada jalan yang dalam kondisi baik dan dalam kondisi rusak, dari data di atas jalan yang baik dan layak untuk digunakan di Provinsi Sumatera Utara sepanjang 2392 km pada tahun 2018.

Gambar 1
Mobilitas dan Demografis Pulau Sumatera



Sumber; PU-net (2020) www.bps.sumbar.co.id

Mobilitas barang dan jasa sangat berpengaruh terhadap proses pembangunan di Indonesia, hal ini juga berpengaruh terhadap pembangunan di wilayah Pulau Sumatera yang kebanyakan memiliki bentuk demografis yang berbukit-bukit, banyak lembahan, dan gunung yang membentang sepanjang Pulau Sumatera. Hal tersebut yang menghambat proses pembangunan di wilayah-wilayah yang terpencil di Pulau Sumatera dikarenakan terhambatnya mobilitas barang dan jasa yang ingin melakukan pembangunan di wilayah-wilayah yang memiliki kondisi demografis ekstrim. Seperti peta di atas, dapat dilihat hanya pada wilayah-wilayah yang tertentu yang pembangunan akses jalan yang mendukung, seperti sekarang sedang ada proses pembangunan jalan Tol Sumatera yang secara tidak langsung telah membantu proses kelancaran mobilitas barang dan jasa di wilayah-wilayah yang dilalui proses pembangunan jalan tol karena

saat pembangunan terjadi pembangunan akses jalan menjadi lebih layak untuk di lalui.

Tabel 4
Data Indeks Pembangunan Manusia Pulau Sumatera (2015-2018)

PROVINSI	TAHUN (IPM %)			
	2015	2016	2017	2018
Aceh	69.45	70	70.6	71.19
Sumut	69.51	70	70.57	71.18
Sumbar	69.98	70.73	71.24	71.73
Riau	70.84	71.2	71.79	72.44
Jambi	68.89	69.62	69.99	70.65
Sumsel	67.46	68.24	68.86	69.39
Bengkulu	68.59	69,33	69.95	70.64
Lampung	66.95	67.65	68.25	69.02
Babel	69.05	69.55	69.99	70.67
Kepri	73.75	73.99	74.45	74.84

Sumber; ipm.bps.go.id (2019)

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai suatu proses untuk perluasan pilihan yang lebih banyak kepada penduduk melalui upaya-upaya pemberdayaan yang mengutamakan peningkatan kemampuan dasar manusia agar dapat sepenuhnya berpartisipasi dalam segala bidang pembangunan. Arti penting manusia dalam pembangunan adalah manusia dipandang sebagai subyek pembangunan yang artinya pembangunan dilakukan memang bertujuan untuk kepentingan manusia atau masyarakat.

Dalam pengukuran dan monitoring pembangunan manusia, idealnya mencakup banyak variabel untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif. Namun, terlalu banyak indikator akan memberikan gambaran yang membingungkan. Isu ini menjadi perhatian penting dalam pengukuran pembangunan manusia. Pembangunan yang dilakukan tidak akan berarti apabila pembangunan tersebut tidak mampu meningkatkan kualitas manusia. Di Pulau

Sumatera IPM terendah terdapat di Provinsi Lampung pada 2015 sebesar 66.95% dan yang tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 74.84% pada tahun 2018. Berdasarkan uraian di atas, penulis bermaksud ingin meneliti mengenai **“Disparitas Pembangunan Wilayah di Pulau Sumatera”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan sebelumnya pada latar belakang masalah, maka perumusan masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pengaruh perbedaan kondisi demografis terhadap ketimpangan pembangunan di Pulau Sumatera ?
2. Bagaimanakah pengaruh mobilitas barang dan jasa terhadap ketimpangan pembangunan di Pulau Sumatera ?
3. Bagaimanakah pengaruh rasio dana perimbangan terhadap ketimpangan pembangunan di Pulau Sumatera ?
4. Bagaimanakah pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap ketimpangan pembangunan di Pulau Sumatera ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat pembangunan daerah di 10 provinsi Pulau Sumatera (Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, dan Lampung)

2. Untuk mengetahui apakah perbedaan kondisi demografis, kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa, rasio dana perimbangan dan indeks pembangunan manusia berpengaruh terhadap tingkat disparitas pembangunan daerah di 10 provinsi di Pulau Sumatera (Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, dan Lampung).

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang bisa diambil dari hasil penelitian ini adalah:

1. Sebagai sumber informasi kepada para pengambil keputusan yaitu pemerintah kota Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, dan Lampung.
2. Sebagai penambah wawasan bagi peneliti tentang cara menganalisis tingkat disparitas pembangunan daerah suatu wilayah dan faktor-faktor yang memengaruhinya.
3. Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.